

ABSTRAK

Tradisi *dowry* atau mahar dalam pernikahan telah menjadi praktik sosial yang mengakar kuat di India selama berabad-abad. Meskipun pada awalnya ditujukan sebagai bentuk pemberian sukarela, *dowry* berkembang menjadi kewajiban yang membebani pihak perempuan dan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kekerasan domestik, diskriminasi gender, hingga kematian perempuan yang dikenal sebagai *dowry deaths*. Pemerintah India menyadari urgensi masalah ini dan sejak tahun 2021 hingga 2023 melakukan berbagai upaya untuk menghapuskan praktik *dowry* melalui pendekatan kebijakan, penegakan hukum, edukasi publik, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan yang diambil oleh Pemerintah India dalam menghapus tradisi *dowry* selama periode tersebut. Dengan menggunakan metode studi pustaka dan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menyoroti dinamika sosial, tantangan budaya, serta implementasi hukum yang menjadi hambatan dalam upaya penghapusan *dowry*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan jumlah kasus *dowry deaths*, praktik *dowry* masih terjadi secara masif, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan dan kesadaran hukum yang rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya berkelanjutan yang mencakup pemberdayaan perempuan, reformasi hukum, dan transformasi budaya untuk menghapuskan diskriminasi gender yang bersumber dari praktik *dowry*.

Kata kunci: *Dowry*, India, diskriminasi gender, kebijakan publik, kekerasan terhadap perempuan, *dowry deaths*.

ABSTRACT

The dowry tradition in marriage has been deeply rooted in Indian society for centuries. Initially intended as a voluntary gift, dowry has evolved into a compulsory practice that burdens the bride's family and leads to numerous negative consequences, including domestic violence, gender discrimination, and the tragic phenomenon of dowry deaths. Acknowledging the urgency of this issue, the Indian government initiated various efforts from 2021 to 2023 to eliminate the practice of dowry through policy implementation, law enforcement, public education, and collaboration with civil society and international organizations. This research aims to analyze the effectiveness of these government efforts during the specified period. Utilizing a literature review method and qualitative descriptive approach, the study explores the social dynamics, cultural challenges, and legal implementation hurdles faced in combating dowry practices. The findings indicate that while there has been a decrease in reported dowry deaths, the practice remains prevalent, particularly in regions with low levels of education and legal awareness. Therefore, continuous efforts, including women's empowerment, legal reform, and cultural transformation, are essential to eliminate gender-based discrimination rooted in the dowry system.

Keywords: *Dowry, India, gender discrimination, public policy, violence against women, dowry deaths.*